

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang penting diselesaikan adalah menyangkut masalah produktivitas pertanian. Hal ini terjadi karena sistem pertanian yang dikerjakan oleh petani di beberapa daerah lebih memilih menggunakan tenaga manusia dalam mengolah kesuburan tanah secara alamiah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya peningkatan produktivitas lahan dan pemberdayaan petani (Watiha, 2012).

Pupuk mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas dalam pertanian. Oleh sebab itu pemerintah mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan yang meliputi aspek teknis penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), bersamaan subsidi hingga sistem distribusi penggunaan pupuk sudah cukup komprehensif. Namun berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Secara spesifik masih sering terjadi berbagai kasus, diantaranya kelangkaan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi HET dan margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat dan pengawasan yang belum

maksimal serta disparitas harga pupuk bersubsidi dan non subsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran. Kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi keluar petani sasaran masih sering ditemukan sehingga menimbulkan kelangkaan dan harga pupuk melebihi HET.

Pupuk bersubsidi yang alokasinya terbanyak adalah pupuk urea sebesar 16.200 ton. Alokasi pupuk ZA 650 ton, SP36 400 ton, Phonska 6.800 ton, dan pupuk organik 5.301 ton. Penggunaan alokasi pupuk subsidi meliputi pupuk untuk sektor pertanian dengan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Dari jumlah tersebut, alokasi pupuk bersubsidi dirinci menurut kebutuhan kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang diterbitkan paling awal bulan Desember 2014. Harga eceran tertinggi sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. Untuk harga HET pupuk urea Rp 1.800,- perkilogram, SP-36 Rp 2.000,- perkilogram, ZA Rp 1.400,- perkilogram, phonska Rp 2.300,- perkilogram dan pupuk organik Rp 500,- perkilogram (Anonymous, 2015).

Kebijakan penyediaan pupuk dengan harga murah melalui pemberian subsidi yang terus meningkat setiap tahun menyebabkan semakin efisiennya penggunaan pupuk oleh petani dan meningkatkan ketidaktepatan sasaran subsidi pupuk yang seharusnya dinikmati oleh petani kecil tanpa dinikmati pula oleh pihak lain (World Bank, 2008). Langkanya pasokan dan terjadinya lonjakan harga serta penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang sasaran masih sering terjadi dan berulang setiap tahunnya erat kaitannya dengan aspek teknis

(data base petani dan kepemilikan lahan yang kurang akurat), aspek regulasi dan aspek manajemen.

Namun dalam hal ini pupuk-pupuk yang bersubsidi diatur oleh Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan kebutuhan riil petani untuk satu periode dalam pengelolaan usahatani. Berdasarkan permintaan yang mengatur alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terbit setiap tahun. RDKK ini digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur. Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani secara serentak dan tepat waktu dan harus diserahkan dua bulan sebelum tanam.

Peningkatan kinerja sektor pertanian tidak lepas dari kondisi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk dipasar baik dari segi kuantitas, kualitas, dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dapat dijamin oleh pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi ini dalam jumlah yang relatif mencukupi kebutuhan dengan diimbangi harga yang terjangkau oleh kalangan pengguna pupuk. Hal ini lah yang mendasari pemerintah memberlakukan subsidi pupuk bagi petani. Kebijakan subsidi pupuk ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah agar mampu berperan sebagai insentif bagii petani untuk

meningkatkan produksi dan produktifitas pangan serta peningkatan pendapatan petani.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan program pemberian pupuk bersubsidi oleh pemerintah belum efektif mengingat masih banyaknya persoalan yang timbul pada tataran implementasinya. Ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab terjadinya langka pasok dan lonjak harga pupuk di tingkat petani, yaitu : (1) pasar pupuk domestik masih bersifat dualistik, tanpa diikuti dengan pengawasan dan penerapan sanksi secara ketat, sehingga terjadi perembesan pupuk dari pasar subsidi ke non subsidi, (2) maraknya ekspor pupuk secara ilegal, seiring meningkatnya harga pupuk di pasar dunia dan melemahnya pasar rupiah terhadap dolar AS, (3) adanya rasa fanatisme petani terhadap merk pupuk tertentu, (4) masih banyak distributor pupuk yang tidak memiliki armada dan gudang penyimpanan, sehingga biaya transportasi yang harus dikeluarkan sangat mahal (Syafa'at *et al*, 2006).

Dari uraian diatas nampak bahwa kelemahan yang terdapat dalam konstruksi dasar kebijakan subsidi pupuk yang berlaku saat ini telah mendorong terjadinya langka pasok dan lonjak harga, HET yang berlaku serigkali menjadi tidak efektif. Kondisi ni membuat pemerintah, DPR, maupun masyarakat relatif belum puas terhadap kebijakan subsidi pupuk yang berlaku saat ini sehingga terdapat wacana untuk mengganti model subsidi bubuk dari subsidi yang dibayarkan langsung kepada produsen (pabrik) pupuk menjadi subsidi yang dibayarkan langsung kepada petani.

Luaslahan wilayah Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes 262,30 Ha, data penggunaan lahan/tanah sawah seluas 138,02 Ha, dan lahan bukan sawah 124,28 Ha. Produksi bawang merah Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes cukup besar dikarenakan mayoritas matapencahariannya bersektor pada usahatani bawang merah, untuk pemasarannya sendiri petani langsung kirim kepasar induk, ada juga yang dijual pasar lokal.

Pemilihan pupuk bersubsidi dikarenakan banyaknya penduduk Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes yang mayoritas matapencahariannya bersektor pada usaha tani bawang merah. Hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu dengan banyaknya jumlah permintaan pupuk bersubsidi pada toko pengecer daerah tersebut lebih besar dari pada penawaran. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti pemasaran pupuk bersubsidi pada usaha tani bawang merah dalam objek penelitian yang dilakukan pada Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pola pengadaan pupuk subsidi di Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana pola distribusi pupuk subsidi di Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes?

3. Bagaimana margin pemasaran dan *margin share* pada pupuk subsidi di Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes?
4. Bagaimana permasalahan dan solusi pemasaran pupuk subsidi di Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pola pengadaan pupuk subsidi di Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui pola distribusi pupuk subsidi di Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui margin pemasaran dan *margin share* pada pupuk subsidi di Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.
4. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi pemasaran pupuk subsidi di Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berarti bagi pemerintah khususnya di bidang pertanian dalam menganalisis pemasaran pupuk subsidi pada usaha tani bawang merah.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi yang hendak meneliti lebih lanjut mengenai pemasaran pupuk subsidi pada usaha tani bawang.

3. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian serta mengaplikasikan penelitian berbagai konsep yang telah didapatkan di bangku perkuliahan, yang berkaitan dengan pemasaran pupuk subsidi.

**E. Pembatasan Masalah**

Dari rumusan masalah yang diuraikan di atas perlu ditetapkan batasan permasalahan penelitian. Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan maka peneliti memberi batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya mengkaji tentang analisis pemasaran pupuk subsidi di Desa Limbangan Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes meliputi :
  - a. Untuk mengetahui pola pengadaan pupuk subsidi
  - b. Untuk mengetahui pola distribusi pupuk subsidi
  - c. Untuk mengetahui margin pemasaran dan *margin share* pada pupuk subsidi
  - d. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi pemasaran pupuk subsidi
- e. Data yang dibutuhkan adalah data tentang pemasaran pupuk subsidi selama satu musim tanam untuk budidaya bawang merah, yaitu data pada musim tanam bulan Februari – April 2018.